

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota- kota besar di Indonesia bahkan kota-kota besar di negara berkembang lainnya. pengkajian tentang permukiman kumuh (*slum*), pada umumnya mencakup tiga segi, pertama kondisi fisiknya, kedua kondisi sosial ekonomi budaya komunitas yang bermukim di pemukiman tersebut, dan ketiga dampak oleh kedua kondisi tersebut. Kondisi fisik tersebut antara lain tampak dari kondisi bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi serta sampah belum dikelola dengan baik.

Salah satu sifat urbanisasi yang terjadi pada negara yang sedang berkembang umumnya dikatakan sebagai urbanisasi semu (*Pseudo Urbanization*) yang dapat diartikan bahwa urbanisasi semu merupakan fenomena Migrasi dari desa ke kota tanpa adanya persiapan, sehingga pada Urbanisasi semu ini ditandai dengan berbagai masalah seperti kemiskinan perkotaan, membengkaknya sektor informal dengan berbagai permasalahan. Sebagai lawannya adalah sifat urbanisasi di negara-negara industri yang maju yang dikatakan sebagai urbanisasi murni (*True Urbanization*) sebagaimana Urbanisasi murni merupakan fenomena migrasi dari desa ke kota dengan dilakukan persiapan untuk menunjang kebutuhan di perkotaan, sehingga tidak menimbulkan permasalahan kemiskinan di perkotaan maupun permasalahan lainnya yang disebabkan urbanisasi, dan sebaliknya fenomena urbanisasi menjadi memberikan dampak baik untuk keberlangsungan suatu kawasan perkotaan Hal ini dikaitkan dengan kenyataan bahwa di negara-negara maju perpindahan penduduk dari desa ke kota telah dijamin oleh tersedianya lapangan pekerjaan non pertanian di kota-kota, tetapi umumnya di negara sedang berkembang pekerjaan non pertanian di kota tidak terjamin (Sujarto dalam Kuswartojo, 2005).

Masalah permukiman kumuh di kota Bandung sebetulnya sudah terjadi sejak tahun 1970-an (sumber : Dalam tugas akhir Erwin Tahun 2013). Beberapa

upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kota Bandung terhadap permukiman kumuh, dengan di antara lain program tersebut yaitu diantaranya Kampung *Improvement Program* (KIP) pada tahun 1978, tidak hanya itu ada pula yang ditata dan dibangun kembali menjadi rumah susun. Pada tahun 1998 dalam rangka proyek penataan permukiman kumuh, telah dilakukan untuk klasifikasi kampung kumuh kota Bandung. (sumber : Budi Prayitno tahun 2015 dalam buku Skema inovatif Penanganan Permukiman Kumuh)

Berdasarkan Renstra MDGs melalui departemen pekerjaan umum menargetkan pada tahun 2020 mendatang semua kota di Indonesia akan terbebas dari kawasan kumuh. Hal itu sejalan dengan Program MDGs (*Milenium Development Goals*) dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi “Tujuan Pembangunan Milenium”, adalah sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan Konferensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000. Kesepakatan anggota PBB mengenai sebuah paket arah pembangunan global yang dirumuskan dalam beberapa Sasaran yaitu:

1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan,
2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua,
3. Mendorong Kesetaraan Gender, dan Pemberdayaan Perempuan,
4. Menurunkan Angka Kematian Anak,
5. Meningkatkan Kesehatan Ibu,
6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya,
7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup, dan
8. Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan

Dari program MGDs menjadikan Arah pengembangan Negara Indonesia Pada 2015 ditargetkan 50 persen kota di Indonesia terbebas dari kawasan kumuh, termasuk Kota Bandung.

Program penanganan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh kementerian perumahan pada tahun 2010 merupakan penanganan perumahan dan permukiman kumuh berbasis kawasan. Program PLP2PK-BK yang dilaksanakan pada tahun 2010 bertujuan untuk mewujudkan lingkungan perumahan dan

permukiman yang layak melalui efektivitas dan efisiensi perencanaan dan penanganan serta menyinergikan tindakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan *stakeholder* lainnya.

Pada tahun 2010 lalu program kegiatan penyusunan rencana Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan atau di singkat PLP2K-BK perkotaan ini sudah dilaksanakan di 20 kabupaten/kota di Indonesia diantaranya Kabupaten Bandung, Donggala, Tangerang, Serang dan Rembang. Untuk wilayah kota kecil dan menengah diantaranya Kota Palu, Bau-Bau, Jambi, Singkawang, Kediri, Pangkalpinang, dan sejumlah kota metropolitan/besar yaitu Kota Pontianak, Medan, Palembang, Yogyakarta, Banjarmasin, Batam, Cimahi, Makassar, dan Bandung. (Sumber : Buku panduan PLP2K-BK, tahun 2010)

Berdasarkan studi terdahulu ditulis oleh Wahyu Anggraini, 2012 (*Universty Telkom*) mengenai program PLP2K-BK telah dijelaskan dalam Penelitian dengan judul “Strategi Komunikasi Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kemenpera) Dalam Sosialisasi Program PLP2K-BK”, bahwa menjelaskan hasil dari penelitian yaitu masih lemah nya implementasi program penanganan terutama di kawasan Tamansari Kota Bandung. Selain itu masih banyaknya permasalahan-permasalahan pada kondisi kawasan permukiman kumuh di kelurahan Tamansari, meliputi kondisi fisik bangunan, sarana dan prasarana, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dalam program penanganan kawasan permukiman kumuh hal tersebut dikarenakan pendekatan melalui komunikasi massa pada Program PLP2K-BK cenderung kurang efektif karena masyarakat tidak terterpa oleh pesan komunikasi massa.

Arahan program penanganan tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagaimana merupakan wujud konsep penanganan yang dilakukan, sebagai berikut.

Gambar 1.1
Bagan Konsep PLP2K-BK



Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum, 2010

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa pada Program PLP2K-BK merupakan suatu program pemerintah dengan melakukan pendekatan Tridaya dalam melakukan penanganan Lingkungan Permukiman kumuh yaitu diantaranya dapat dilihat berdasarkan Pemberdayaan Ekonomi, Pemberdayaan Lingkungan, dan Pemberdayaan Manusia. Selain itu lingkup penanganan yang dilakukan berupa perbaikan dan pemugaran, peremajaan, dan pengelolaan dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Keterlibatan pada penanganan kawasan permukiman kumuh diantaranya pada pihak pemerintah daerah, Swadaya, Formal, kemitraan. Sehingga beberapa program tersebut menghasilkan beberapa bentuk penanganan seperti Bedah kampung, KPRS Mikro, Rusunawa/Rusunami, PSU Perumahan, Fasilitas kemitraan (CSR), dan fasilitas oleh instansi lain.

Program Penanganan permukiman kumuh baik pada PLP2K-BK maupun pada arahan pemerintah daerah sangat penting dilakukan sebagaimana untuk mewujudkan terciptanya lingkungan perumahan yang layak huni baik dari kondisi fisik bangunan, maupun sarana dan prasarana lingkungan. Terdapat beberapa

kebijakan daerah yang telah disesuaikan dengan arahan pemerintahan pusat atau nasional yaitu diantaranya RPJP Kota Bandung Tahun 2005-2025, RPJMD Kota Bandung Tahun 2014-2018, RPI2JM Kota Bandung Tahun 2015-2019, RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031, SPPIP Kota Bandung Tahun 2010-2030, dan SSK Bandung Tahun 2010-2014.

Namun masih adanya beberapa permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga menjadikan suatu alasan penting melakukan penilaian pada penanganan kawasan permukiman kumuh dengan melihat penilaian kondisi eksisting kawasan permukiman dengan arahan penanganan yang seharusnya.

1.2. Isu Permasalahan

Adapun beberapa permasalahan dalam kajian penanganan kumuh yang berkembang yaitu diantaranya sebagai berikut.

- a) Beberapa Program upaya dalam permukiman kumuh Kota Bandung masih belum efektif terhadap kawasan kumuh Tamansari.
- b) Masih adanya kondisi fisik lingkungan di kawasan kumuh Tamansari yang tidak layak huni.
- c) Masih rendahnya upaya penanganan terhadap kawasan permukiman kumuh dilihat pada kondisi eksisting dan arahan seharusnya, terutama penanganan pada kawasan permukiman kumuh di bantaran sungai Cikapundung.

1.3. Tujuan, Manfaat, dan Sasaran

Terdapat tujuan dan sasaran dalam penelitian kawasan permukiman kumuh di Kota Bandung terutama di kawasan kumuh Tamansari, diantaranya sebagai berikut.

1.3.1 Tujuan

Dalam tujuan melakukan penelitian ini sebagaimana mengetahui tingkat pencapaian penanganan berdasarkan kesesuaian arahan dari kebijakan dan program penanganan kawasan kumuh yang telah terealisasi melalui hasil penilaian upaya penanganan.

1.3.2 Manfaat

Penelitian pada penilaian terhadap upaya penanganan di kawasan permukiman kumuh bantaran sungai Kelurahan Tamansari memiliki manfaat yang diperoleh yaitu, Dapat meninjau hasil dari upaya penanganan yang telah terealisasikan melalui penilaian. Sehingga hal tersebut dapat menjadi acuan untuk prediksi kinerja penanganan permukiman kumuh pada tahun berikutnya sesuai dengan yang telah ditargetkan oleh program-program dalam penanganan permukiman kumuh di perkotaan. Selain itu dapat memberikan arahan-arahan untuk rencana penanganan yang diperlukan khususnya dalam memberikan penanganan pada kawasan permukiman kumuh dengan karakteristik permukiman kumuh bantaran sungai di wilayah perkotaan.

1.3.3 Sasaran

Pencapaian tujuan penelitian diantaranya memiliki beberapa sasaran yang perlu tercapai yaitu:

1. Teridentifikasi kebijakan dan program penanganan permukiman kumuh yang telah ada.
2. Teridentifikasi tingkat Penanganan permukiman kumuh ditinjau dari aspek fisik lingkungan permukiman, kondisi pertimbangan lainnya berupa kondisi sosial dan budaya, dan legalitas tanah terkait.
3. Teridentifikasi hasil penilaian melalui evaluasi dari program penanganan permukiman kumuh dengan penilaian kondisi eksisting.
4. Arahan pengembangan penanganan permukiman kumuh berdasarkan hasil analisis.

1.4. Ruang Lingkup

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Kelurahan Tamansari terletak di Kecamatan Bandung Wetan yang memiliki luas 102 Ha serta terletak diketinggian 500 mdpl (meter diatas permukaan laut). Kelurahan Tamansari termasuk dalam Kecamatan Bandung Wetan, yang merupakan salah satu bagian wilayah Kota Bandung, memiliki luas lahan sebesar 102 Ha. Secara administratif Kelurahan Tamansari dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kelurahan Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung
- Bagian Utara : Kelurahan Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong
- Bagian Timur : Kelurahan Citarum Kecamatan Bandung Wetan
- Bagian Barat : Kelurahan Cipaganti Kecamatan Coblong.

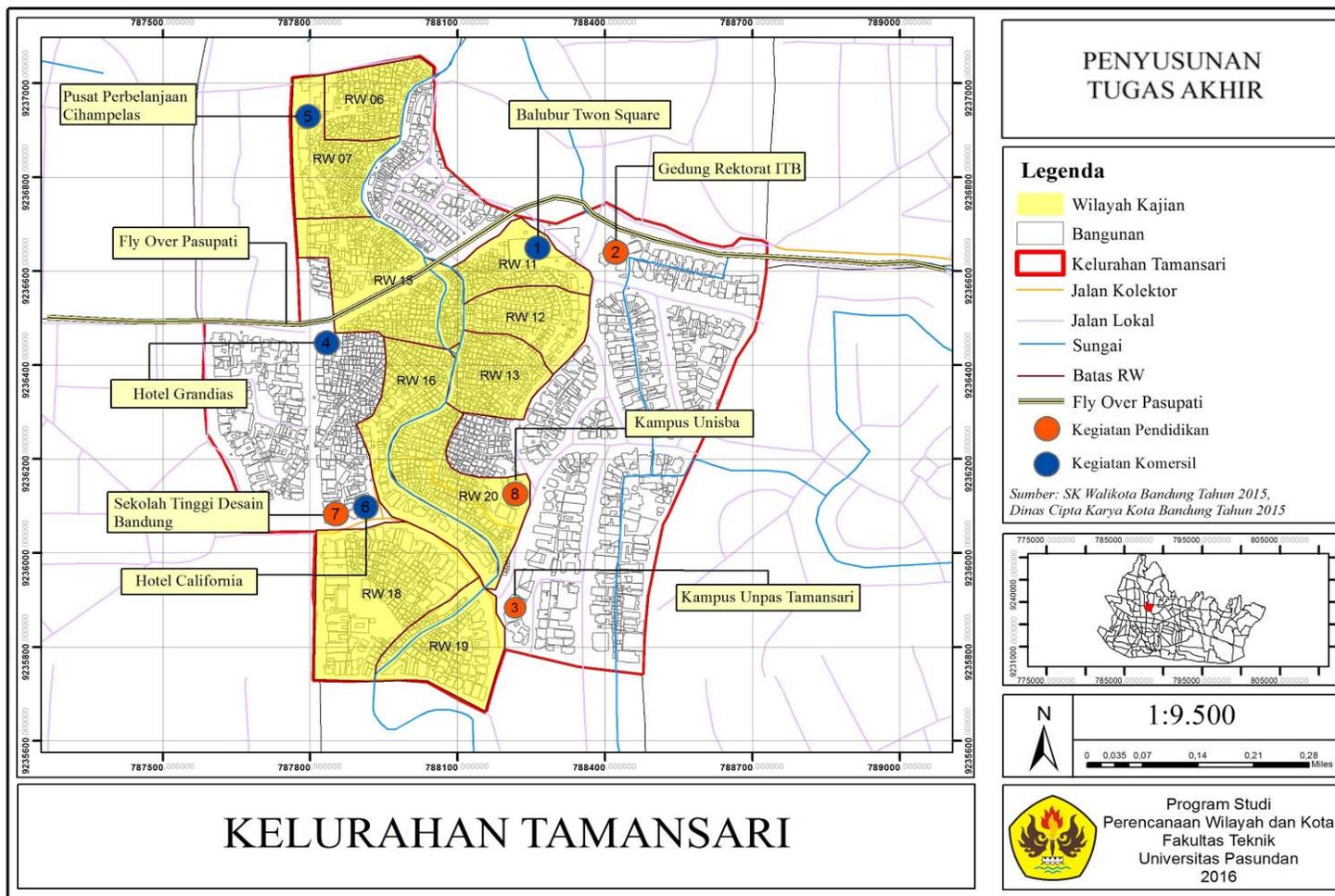
Berdasarkan SK walikota tahun 2015 terdapat 10 RW di kelurahan Tamansari yang merupakan kawasan permukiman kumuh, yaitu diantaranya sebagai berikut.

Tabel 1.1
Luas Wilayah Penelitian

Wilayah Penelitian	Luas (Ha)
RW 06	2,78
RW 07	3,58
RW 16	4,53
RW 18	7,5
RW 19	4,18
RW 20	4,32
RW 13	2,99
RW 15	6,34
RW 12	2,95
RW 11	2,71
Total Luasan	41,93

Sumber : SK Walikota Tahun 2015

Gambar 1.2
Peta Adminitrasi



1.4.2 Ruang Lingkup Subtansi

Pada kajian penelitian untuk lingkup kajian pembahasan memiliki beberapa substansi yaitu diantaranya sebagai berikut.

1. Menjelaskan tentang kajian arahan kebijakan dan Program PLP2K-BK yang dilaksanakan pada tahun 2010 dalam penanganan kawasan permukiman kumuh, hal tersebut perlu dibahas sebagaimana peran pemerintah dalam menangani permasalahan permukiman kumuh di kawasan perkotaan, dan respon masyarakat pada kawasan permukiman kumuh terhadap adanya program penanganan.
2. Mengkaji kondisi fisik kawasan permukiman kumuh sebagaimana dalam kondisi fisik dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, diantaranya kondisi fisik bangunan, kondisi jalan lingkungan, kondisi drainase lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, kondisi pengaman kebakaran. Selain itu terdapat Bahasan mengenai permasalahan sosial-ekonomi, hal tersebut berkaitan dengan kearifan lokal yang berkembang di permukiman kumuh yang menjadikan adanya kegiatan sehari-hari baik untuk kepentingan sosial maupun perekonomian.
3. Menganalisis mengenai Pencapaian dan Kesesuaian terhadap pemerintah dalam pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh dengan menggunakan pendekatan evaluasi rencana. Adanya potensi dan masalah dari adanya program penanganan permukiman kumuh.
4. Menjelaskan beberapa arahan pada potensi dan masalah dari program penanganan permukiman kumuh, sehingga hal ini dapat sebagai pertimbangan dasar dalam rekomendasi berupa arahan pada permasalahan.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pengumpulan Data

Pada kajian yang memiliki sifat kualitatif terdapat tiga metode yang lazim dilakukan untuk mengumpulkan data, yaitu survei sekunder; observasi; dan wawancara. Hal ini perlu dilakukan sebagaimana dalam memberikan penilaian

kondisi kawasan permukiman kumuh. Berikut ini akan dijelaskan pemanfaatan metode-metode tersebut.

A. Survei Sekunder

Survei sekunder yang dilakukan berupa **survei instansional** dan **survei keputakaan**. Survei instansional adalah tipikal pengumpulan data sekunder yang berbentuk produk-produk pendataan informatif (dokumen) maupun beberapa masukan yang terkait dengan materi pekerjaan yang berasal dari pelaku terkait guna eksplorasi informasi lebih lanjut. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan bersumber dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Data-data tersebut adalah:

- a. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permukiman kumuh;
- b. kebijakan pembangunan dan tata ruang;
- c. kebijakan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. kebijakan pembangunan sektoral;
- e. program penanganan permukiman kumuh yang sudah pernah dilaksanakan pada tahun 2010;
- f. perangkat dan sumberdaya lainnya yang sudah tersedia dalam penanganan permukiman kumuh, seperti sistem informasi, SDM, kelembagaan, pendanaan.

Sementara survei keputakaan merupakan survei yang dilakukan terhadap data dan informasi yang telah tersedia. Melalui survei keputakaan ini akan digali konsep-konsep, teori-teori, serta hasil studi dan kajian mengenai penanganan permukiman kumuh. Data serta informasi yang diperlukan dikumpulkan melalui buku teks, laporan-laporan studi, makalah, jurnal dan buletin.

B. Survei Primer

1. Observasi Lapangan

Observasi lapangan adalah suatu metode untuk melakukan kajian langsung pada lokasi kasus studi, terutama pada kawasan kumuh sempadan sungai Cikapundung kelurahan Tamansari kota Bandung. Observasi lapangan ini digunakan untuk mengamati secara langsung lokasi kawasan permukiman

kumuh di daerah studi baik yang telah maupun belum ditangani. Metode observasi lapangan pada lokasi yang telah ditangani digunakan untuk melengkapi pemahaman program penanganan permukiman kumuh serta hasil pelaksanaan program yang bersumber dari data-data sekunder. Untuk lokasi yang belum ditangani, observasi lapangan digunakan untuk mengenali karakteristik permukiman kumuh yang dapat melengkapi gambaran karakteristik permukiman kumuh yang telah diperoleh melalui data sekunder.

Terdapat beberapa indikator kondisi keteraturan bangunan terdiri pengaturan blok bangunan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan dan wajah jalan). Kondisi persyaratan teknis bangunan terdiri dari persyaratan meliputi pengendalian dampak lingkungan, pembangunan bangunan gedung diatas dan/atau dibawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum, keselamatan bangunan gedung (BG), kenyamanan (BG), dan Kemudahan (BG). Kondisi cangkupan pelayanan jalan dengan standar minimal lebar jalan lingkungan 2 meter, kondisi buruknya jalan lingkungan pada permukaan jalan. Terlayani nya saluran drainase pada saluran tersier atau lokal, dan keterhubungan saluran drainase dengan hirarki diatasnya, serta kesesuaian kondisi jaringan drainase dilihat pada kondisi kerusakan saluran drainase. Kondisi tidak terlayani nya prasarana proyeksi kebakaran meliputi pasokan air, jalan lingkungan, sarana komunikasi, data sistem proteksi kebakaran, dan bangunan pos kebakaran, Kondisi tidak terlayaninya terhadap tersediaan sarana proektesi kebakaran seperti pasokan air, jalan lingkungan, sarana komunikasi, data sistem proteksi kebakaran lingkungan, dan bangunan Pos kebakaran. Beberapa indikator tersebut diperhatikan dalam observasi lapangan dikarenakan beberapa indikator tersebut merupakan arahan program penanganan permukiman kumuh terkait kondisi fisik bangunan, sarana dan prasarana perumahan.

2. Wawancara Semi-Terstruktur

Wawancara semi terstruktur terkait dengan pengumpulan data yang bersumber langsung dari sumber data dengan menggunakan teknik wawancara untuk menggali informasi yang akurat dan mendalam dari para pelaku yang diantaranya staf ahli bidang permukiman dan perumahan Dinas Cipta Karya Kota Bandung, Staf kelurahan Tamansari, dan Ketua RW, dimana informasinya seringkali tidak tercatat di dalam suatu dokumen dan berdasarkan pada pengalaman yang terjadi di lapangan. Dalam Penelitian Penilaian Penanganan kawasan Permukiman Kumuh digunakan teknik wawancara semi-terstruktur dimana pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan untuk memandu jalannya wawancara. Pertanyaan tersebut tidak mengikat tetapi fleksibel karena informasi yang disampaikan oleh pelaku dapat menimbulkan pertanyaan lainnya yang mungkin belum disiapkan. Dengan teknik ini maka dapat digali informasi lebih mendalam dan lebih luas dari responden.

3. Quisioner

Quisioner dilakukan untuk melakukan pengumpulan data terhadap sampel yang telah dipilih. Penentuan teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *probability sampling*, yaitu teknik sampling yang memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Polulasi dalam penelitian ini adalah jumlah KK (kelapa keluarga) atau yang mewakilinya dengan berdasarkan data awal untuk jumlah populasi didasarkan pada SK walikota tentang Permukiman kumuh tahun 2015 dan berdasarkan daftar KK (kelapa keluarga) yang termasuk kedalam KK miskin pada program nasional dengan populasi sebanyak 410 KK miskin di beberapa RW yaitu pada RW 06, 07, 15, 16, 18, 19, 20, 13, 12, dan 11. Sampel dapat dihitung menggunakan Rumus Ar-Rasyid (1994;156 dalam Teguh Kismantoroadji), Sebagaimana pengertian pada metode Ar-Rasyid yaitu suatu formula Analisis korelasi yang menunjukkan keeratan hubungan antara dua variabel atau lebih. Tujuan diadakannya analisis korelasi antara lain:

1. Untuk mencari bukti terdapat tidaknya hubungan (korelasi) antar variabel,
2. Bila sudah ada hubungan, untuk melihat besar kecilnya hubungan antar variabel.
3. Untuk memperoleh kejelasan dan kepastian apakah hubungan tersebut berarti (meyakinkan/ signifikan) atau tidak berarti (tidak meyakinkan).

Dari hal tersebut dapat digunakan pada penelitian, dikarenakan perlu beberapa data yang masing-masing memiliki keterhubungan pada penanganan permukiman kumuh, yaitu masyarakat atau (kepala keluarga) sebagai populasi di kawasan permukiman kumuh. Sehingga dapat dilihat pada perhitungan berikut :

$$n_0 = \left(\frac{Z\alpha}{2BE} \right)^2$$

Dengan kriteria sebagai berikut :

Jika $n_0 \leq 0,05 N$, maka $n = n_0$

Jika $n_0 > 0,05 N$, maka $n = \frac{n_0}{1 + (n_0 - 1)/N}$

Dimana :

α = taraf kesalahan yang besarnya ditetapkan 0,05

N = jumlah populasi

BE = *Bound of Error* diambil 10%

$Z \alpha$ = nilai dalam tabel $Z = 1,99$

Dengan rumus diatas dapat dihitung :

$$n_0 = \left(\frac{Z\alpha}{2BE} \right)^2$$

$$n_0 = \left(\frac{1,99}{2(0,1)} \right)^2 = 99,0025$$

Dan $n_0 = 0,05 N = 0,05 (410) = 20,5$

Karena $n_0 > 0,05$ atau $99.0025 > 20,5$, maka Sampel adalah :

$$n = \frac{mD}{1 + ((mD - 1)/N)} = \frac{79,9051655}{1 + ((79,9051655 - 1)/410)} = 79,9051655 = 80 \text{ sampel}$$

Sehingga dengan hasil sampel yang didapatkan yaitu sebesar 80 sampel, maka jika dibandingkan dengan jumlah populasi keseluruhan yaitu sebanyak 410 terdiri dari beberapa persentase jumlah poluasi setiap RW.

1.5.2 Metode Analisis

Dalam penelitian memerlukan beberapa cara atau metode dalam melakukan analisis sehingga hal tersebut menjadi suatu cara untuk mencapai tujuan penelitian, beberapa cara tersebut diantaranya yaitu metode deskriptif kualitatif, metode analisis deskriptif kuantitatif, metode analisis *superimpose*, dan metode analisis evaluasi.

1. Metode Analisis Deskriptif Kualitatif

Analisis ini digunakan untuk menginterpretasikan data-data yang ada sehingga diperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai kondisi yang tengah terjadi di lapangan. Pada penelitian ini metode analisis deskriptif kualitatif di gunakan pada analisis kebijakan dan program penanganan permukiman kumuh, evaluasi, serta arahan pengembangan terkait potensi dan permasalahan.

2. Metode Analisis Deskriptif Kuantitatif

Metode penetapan kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan metode analisis deskriptif kuantitatif, metode ini merupakan metode analisis dengan mendeskripsikan keadaan suatu gejala yang telah direkam melalui alat ukur kemudian diolah sesuai dengan fungsinya. Hasil pengolahan tersebut selanjutnya dipaparkan dalam bentuk angka-angka sehingga memberikan suatu kesan lebih mudah ditangkap maknanya oleh siapapun yang membutuhkan informasi tentang keberadaan gejala tersebut. Dalam metode deskriptif kuantitatif dilakukan untuk menentukan kekumuhan di kawasan bantaran sungai perkotaan, dimana menggunakan teknik skoring yang telah ditetapkan dengan masing-masing kriteria tertentu, yaitu diantaranya sebagai berikut.

Menggunakan teknik skoring berdasarkan variabel dan indikator yang ditetapkan pada UU No. 1 Tahun 2011, dan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Depkimpraswil, 2001). Untuk jelasnya mengenai penetapan kriteria & karakteristik kawasan kumuh dapat dilihat beberapa variabel-variabel penelitian mengenai kawasan permukiman kumuh, sebagai berikut :

A. Kekumuhan Fisik Lingkungan, terdiri dari sub variabel :

1. Kondisi fisik bangunan
2. Kondisi jalan lingkungan
3. Kondisi penyediaan air minum
4. Kondisi drainase lingkungan
5. Kondisi pengelolaan air limbah.
6. Kondisi pengelolaan persampahan,.
7. Kondisi proteksi kebakaran.

B. Kondisi Permukiman dari Pertimbangan Lainnya

1. Kondisi Budaya
2. Kondisi Sosial

C. Kondisi Permukiman dari Legalitas Tanah

1. Kejelasan Status penguasaan lahan
2. Kesesuaian RTR

3. Metode Analisis Evaluasi

Analisis Evaluasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka, dan penilaian. Evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya:

- Fokus nilai, Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan dan

program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi.

- Interdependensi fakta nilai, Tuntutan evaluasi tergantung baik fakta maupun nilai, untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi, diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu.
- Orientasi masa kini dan masa lampau, Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil dimasa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan.

Dualitas nilai, Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada dapat dianggap sebagai intrinsik atau ekstrinsik. Nilai-nilai sering ditata didalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran. Penelitian penggunaan metode analisis evaluasi yang digunakan adalah evaluasi *Ex-Post*, yang merupakan metode evaluasi *outcome* atau mungkin juga *impact/dampak* serta melihat kesesuaian dan pencapaian terutama dari Program arahan penanganan permukiman kumuh, Maka untuk analisis evaluasi yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan metode analisis deskriptif komparasi.

Metode komparasi Menurut Sudijono Anas dalam Moh. Nazir (2005:63) Metode komparasi pada intinya adalah Metode analisis yang berusaha untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda, orang, prosedur kerja, ide, kritik terhadap orang atau kelompok, terhadap suatu ide atau prosedur kerja. Dalam penelitian mengenai penilaian penanganan kawasan permukiman

kumuh maka terdapat beberapa variabel yang dilakukan komparasi yaitu arahan PLP2K-BK, dan Arahan pemerintah daerah terhadap penanganan kondisi permukiman kumuh dengan kondisi eksisting yang dilihat pada variabel penilaian kekumuhan sebelumnya.

4. Metode Analisis *Superimpose*

Metode ini digunakan untuk menentukan penanganan permukiman kumuh, dengan teknik *overlapping map* yang mempertimbangkan :

- Kesesuaian Tata Ruang
- Hasil Tipologi Kekumuhan
- Variabel Tipologi Kekumuhan lainnya

dengan bantuan *tools* SIG (Sistem Informasi Geografis) untuk memetakan penanganan permukiman kumuh.

1.6. Matriks Analisis

Dalam penelitian terhadap penilaian kawasan permukiman kumuh perlu adanya matriks analisis sebagaimana untuk memudahkan dalam menganalisis terutama dalam penelitian terhadap penilaian kawasan permukiman kumuh. Matriks analisis dapat dilihat berdasarkan tabel berikut.

Tabel 1.2
Matrisk Analisis Penelitian

Analisis	Sasaran	Output	Indikator Analisis	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis
Analisis Tingkat Kekumuhan Kondisi fisik	Fisik Bangunan	Tingkat Kekumuhan Kondisi fisik lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Keteraturan bangunan <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengaturan bentuk, besaran, Peletakan dan Tampilan Bangunan pada Zona. ✓ Pengaturan Blok Bangunan, Kapling Bangunan, Ketinggian dan elevasi lantai dan wajah jalan. - Tingkat Kepadatan Bangunan <ul style="list-style-type: none"> ✓ Untuk Kota metropolitan dan kota besar > 250 unit/ha ✓ Untuk kota sedang 	Data Primer	Analisis Deskriptif Kuantitatif

Analisis	Sasaran	Output	Indikator Analisis	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis
			<p>dan kota kecil > 200 unit/ha.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketidaksiesuaian dengan persyaratan teknis <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengendalian dampak ✓ Pembangunan bangunan Gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum ✓ Keselamatan bangunan ✓ Kenyamanan bangunan ✓ Kemudahan bangunan 		
	Jalan Lingkungan		<ul style="list-style-type: none"> - Cangkupan Pelayanan Jalan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> ✓ Standar pelayanan jalan lingkungan lebar 2 meter - Kualitas permukaan jaringan jalan lingkungan <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sebagian/seluruh permukaan jalan terjadi kerusakan 		
	Penyediaan Air minum		<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan akses aman air minum <ul style="list-style-type: none"> ✓ Air yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa - Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak dapat melayani kebutuhan air minum 60 liter/orang/hari 		
	Drainase Lingkungan		<ul style="list-style-type: none"> - Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air <ul style="list-style-type: none"> ✓ Menimbulkan genangan air lebih dari 30 cm selama 2 kali setahun - Ketersediaan Drainase <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak tersedia 		

Analisis	Sasaran	Output	Indikator Analisis	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis
			<p>saluran tersier, atau saluran lokal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketidak terhubungan dengan sistem drainase perkotaan <ul style="list-style-type: none"> ✓ Saluran drainase lingkungan tidak terhubung dengan saluran pada hirarki di atasnya - Tidak terpeliharanya drainase <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemeliharaan rutin ✓ Pemeliharaan berkala - Kualitas konstruksi drainase <ul style="list-style-type: none"> ✓ Berupa galian tanah tidak berlapis material atau penutup pada saluran 		
	Pengelolaan air limbah		<ul style="list-style-type: none"> - Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kakus/Kloset tidak terhubung dengan saluran <i>septic tank</i> baik secara individual maupun komunal - Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kloset leher angsa tidak terhubung dengan tanki septik ✓ Tidak tersedia sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat 		
	Pengelolaan Persampahan		<ul style="list-style-type: none"> - Prasarana dan Sarana Persampahan tidak sesuai persyaratan teknis <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tempat sampah dengan pemilahan sampahskala domestik ✓ Tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, 		

Analisis	Sasaran	Output	Indikator Analisis	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis
	<p data-bbox="379 1758 502 1814">Proteksi Kebakaran</p>		<p data-bbox="805 398 1069 459">reuse, recyle) pada skala lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="805 459 1069 582">✓ Gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan <li data-bbox="805 582 1069 705">✓ Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan <li data-bbox="774 705 1069 795">- Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai standar teknis <li data-bbox="805 795 1069 952">✓ Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; <li data-bbox="805 952 1069 1131">✓ Tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recyle) pada skala lingkungan <li data-bbox="805 1131 1069 1254">✓ Gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan <li data-bbox="805 1254 1069 1377">✓ Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan <li data-bbox="774 1377 1069 1489">- Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan <li data-bbox="805 1489 1069 1556">✓ Pemeliharaan rutin; dan/atau <li data-bbox="805 1556 1069 1590">✓ Pemeliharaan berkala <p data-bbox="774 1590 1069 1680">- Ketidakterediaan prasarana proteksi kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="805 1680 1069 1713">✓ Pasokan air; <li data-bbox="805 1713 1069 1747">✓ Jalan lingkungan; <li data-bbox="805 1747 1069 1780">✓ Sarana komunikasi; <li data-bbox="805 1780 1069 1870">✓ Data sistem proteksi kebakaran lingkungan; dan <li data-bbox="805 1870 1069 1926">✓ Bangunan pos kebakaran. <p data-bbox="774 1926 1069 1982">- Ketidakterediaan sarana Proteksi</p>		

Analisis	Sasaran	Output	Indikator Analisis	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis
			kebakaran ✓ Alat pemadam api ringan (APAR); ✓ Mobil pompa; ✓ Mobil tangga sesuai kebutuhan; dan ✓ Peralatan pendukung lainnya		
Analisis Kondisi Perumahan dari Pertimbangan lainnya	Kondisi Sosial	Tingkat Kekumuhan dari pertimbangan lainnya	- Adanya partisipasi masyarakat - Tidak adanya partisipasi masyarakat	- Data Primer	Analisis Deskriptif Kuantitatif
	Kondisi Budaya		- Adanya kebudayaan - Tidak adanya kebudayaan		
Analisis Kondisi Perumahan dari legalitas tanah	Kejelasan Status Penguasaan Lahan	Tingkat kekumuhan dari legalitas tanah	- Kepemilikan sendiri - Kepemilikan pihak lain	- Data Primer - Data Sekunder	Analisis Deskriptif Kualitatif
	Kesesuaian RTR		- Kesesuaian peruntukan perumahan - Bukan peruntukan Perumahan		
Analisis penilaian Kesesuaian Penanganan permukiman kumuh	Arahan penanganan permukiman kumuh	Kesesuaian dan ketidaksesuaian penanganan	- Arahan penanganan PLP2K-BK - Arahan pemerintah daerah tentang Penanganan permukiman kumuh - Kondisi eksisting permukiman kumuh	Data Sekunder	Analisis Deskriptif Komparatif
	Kondisi eksisting permukiman kumuh				
Perumusan Arahan Penanganan	Potensi pada kesesuaian penanganan	Arahan penanganan Kawasan permukiman kumuh bantaran sungai	- Arahan pengembangan potensi pada kesesuaian - Arahan dalam mengatasi permasalahan pada ketidaksesuaian	Data Sekunder	Analisis Deskriptif Kualitatif
	Permasalahan pada ketidaksesuaian penanganan				

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2016

1.7. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan dalam laporan penelitian yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang , perumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi, metodologi penelitian, kerangka pemikiran, serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang kajian penelitian yang ditinjau dari beberapa teori-teori yang berkaitan, ataupun beberapa kajian pustaka terkait dengan penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai studi kajian yaitu tentang gambaran secara umum permukiman bantaran sungai sebagaimana menjadi suatu data/informasi awal seperti halnya input data dalam memahami karakteristik secara umum.

BAB IV ANALISIS

Menjelaskan tentang analisis mengenai tingkat kekumuhan dan kelayakan permukiman, dan evaluasi penanganan kawasan permukiman kumuh di bantaran sungai Cikapundung kelurahan Tamansari, serta Arahan terhadap potensi dan masalah yang berkembang pada kawasan permukiman kumuh.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini menjelaskan terkait dari hasil analisis yang telah dilakukan dengan menarik sebuah kesimpulan dan dari beberapa bab sebelumnya yang telah dijelaskan. Selain itu menjelaskan tentang output dari hasil penelitian berupa sarana sebagaimana merupakan masukan atau rekomendasi terhadap kawasan permukiman di wilayah kajian. Selain itu terdapat pula kelemahan studi penelitian, dan beberapa masukan untuk studi lanjutan yang dapat dilakukan.